

**IMPLEMENTASI UNITED NATIONS WORLD TOURISM  
ORGANIZATION (UNWTO) DALAM RANGKA MENDUKUNG SEKTOR  
PARIWISATA INDONESIA PERIODE 2021-2022  
SKRIPSI**



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

Oleh:

**Rifqi**

19323001

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

**IMPLEMENTASI UNITED NATIONS WORLD TOURISM  
ORGANIZATION (UNWTO) DALAM RANGKA Mendukung SEKTOR  
PARIWISATA INDONESIA PERIODE 2021-2022**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh  
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

**Rifqi**

19323001

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**IMPLEMENTASI UNITED NATIONS WORLD TOURISM ORGANIZATION (UNWTO)**  
**DALAM RANGKA Mendukung SEKTOR PARIWISATA INDONESIA PERIODE**  
**2021-2022**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional Fakultas  
Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh derajat  
Sarjana S1 Hubungan Internasional



Pada Tanggal  
Rabu, 16 Agustus 2023

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

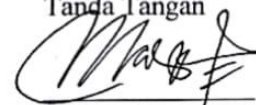
Ketua Program Studi

  
Karina Utami Dewi S.IP., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.
- 2 Gustri Eni Putri, S.IP, M.A.
- 3 Willi Ashadi, S.H.I., M.A.

Tanda Tangan







## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

*Yogyakarta, 23 Agustus 2023*



---

*Rifqi*

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI</b>	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	ii
<b>PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK</b>	iii
<b>DAFTAR ISI</b>	iv
<b>DAFTAR TABEL</b>	vi
<b>DAFTAR SINGKATAN</b>	vii
<b>ABSTRAK</b>	viii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	1
<b>1.1 Latar Belakang</b>	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b>	6
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b>	6
<b>1.4 Cakupan penelitian</b>	6
<b>1.5 Tinjauan Pustaka</b>	7
<b>1.6 Kerangka Pemikiran</b>	9
<b>1.7 Argumen Sementara</b>	16
<b>1.8 Metode Penelitian</b>	16
<i>1.8.1 Jenis Penelitian</i>	16
<i>1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian</i>	17
<i>1.8.3 Metode Pengumpulan Data</i>	17
<i>1.8.4 Proses Penelitian</i>	17
<b>1.9 Sistematika Pembahasan</b>	18
<b>BAB 2 PROFIL UNWTO DAN PENGARUHNYA PADA SEKTOR PARIWISATA INDONESIA</b>	20
<b>2.1. United Nations World Tourism Organization (UNWTO)</b>	20
<b>2.2. Kiprah UNWTO di Indonesia Era Sebelum 2021</b>	22
<b>2.3 Tantangan Sektor Pariwisata Saat Pandemi Covid-19</b>	29
<b>BAB 3 IMPLEMENTASI UNITED NATIONS WORLD TOURISM ORGANIZATION TERHADAP PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA INDONESIA 2021 - 2022</b>	33
<b>3.1. Implementasi UNWTO Dalam Mendukung Sektor Pariwisata Indonesia</b>	34
<b>3.2. Kerja Sama Dengan Berbagai Aktor</b>	47
<b>3.3. Melakukan Pengawasan</b>	49
<b>3.4 Tranparansi</b>	51
<b>3.5 Membantu Mengembangkan Kapasitas Negara</b>	52

<b>BAB 4</b>	54
<b>PENUTUP</b>	54
<b>4.1. Kesimpulan</b>	54
<b>4.2 Rekomendasi</b>	55
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	56

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1. 3 Macam Instrument Organisasi Internasional .....</b>	<b>12</b>
---	-----------

## DAFTAR SINGKATAN

UNWTO	: United Nations World Tourism Organization
HAM	: Hak Asasi Manusia
Kememparekraf	: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
PSBB	: Program Pembatasan Sosial Berskala Besar
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
IUOTO	: International Union for Official Tourism Organization
ICI	: International Climate Change
IESR	: Institute for Essential Services Reform
WHO	: World Health Organization
CHSE	: Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability
MoU	: Memorandum of Understanding
WTD 2022	: World Tourism Day 2022
STREAM	: Sustainable Tourism Through Energy Efficiency with Adaption and Mitigation measures



## **ABSTRAK**

Sektor pariwisata Indonesia terus melakukan berbagai upaya untuk bangkit sepanjang tahun 2021 – 2022, dari adanya efek pandemi Covid-19 yang mengakibatkan kelumpuhan dan kerugian di berbagai sektor ekonomi. Melalui upaya dalam rangka membangkitkan sektor pariwisata, Indonesia bekerja sama dengan United Nations World Tourism Organization (UNWTO) yang memiliki peran penting terhadap pengembangan sektor pariwisata di Dunia. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis Kontribusi United Nations World Tourism Organization (UNWTO) dalam rangka mendukung sektor pariwisata periode 2021 – 2022 melalui penggunaan pendekatan *Managerial* yang terdapat pada konsep teori implementasi organisasi internasional di ranah domestik. Penulis menemukan bahwa United Nations World Tourism Organization (UNWTO) mengimplementasikan visi, misi, program, maupun nilainya melalui berbagai cara yang dilakukan seperti berupa pengawasan, cara berlaku transparan dan terbuka akan perannya, serta bekerja sama dengan berbagai aktor pihak seperti kementerian Indonesia maupun dengan para aktor pemerintah dan non-pemerintah internasional.

Kata Kunci : Pariwisata Indonesia, UNWTO, Pandemi Covid-19, Implementasi Organisasi Internasional

## ***ABSTRACT***

The tourism sector in Indonesia has been making various efforts to recover throughout the years 2021-2022, in response to the impacts of the Covid-19 pandemic, which has caused paralysis and losses in various economic sectors. In its efforts to revitalize the tourism sector, Indonesia has collaborated with the United Nations World Tourism Organization (UNWTO), which plays a crucial role in the global development of the tourism sector. This research aims to analyze the contribution of the United Nations World Tourism Organization (UNWTO) in supporting the tourism sector during the 2021-2022 period, using a managerial approach based on the concept of implementing international organization theories in the domestic context.

The author found that the United Nations World Tourism Organization (UNWTO) implements its vision, mission, programs, and values through various means, such as monitoring, transparency, and openness in its role, as well as cooperation with different stakeholders, including the Indonesian government and various international governmental and non-governmental actors.

Keywords: Indonesian Tourism, UNWTO, Covid-19 Pandemic, International Organization Implementation.

Keywords: Indonesian Tourism, UNWTO, Covid-19 Pandemic, International Organization Implementation.

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pariwisata merupakan salah satu sektor industri yang memiliki peran cukup strategis dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan maupun pengembangan ekonomi, walau dalam kurun waktu pada tahun 2021 hingga 2022 dunia global sedang bersama-sama berusaha untuk melakukan pemulihan ekonomi yang diakibatkan oleh efek pasca pandemi Covid-19, beruntungnya pada seiring berjalanya waktu, tetap terdapat sebuah peningkatan yang cukup baik maupun signifikan terhadap kualitas maupun sumbangsi bagi perekonomian dunia.

Cukup banyak negara di Dunia yang menempatkan sektor pariwisata menjadi sektor andalan dalam meningkatkan perekonomian nasionalnya, dimana salah satunya ialah Negara Indonesia. Sejak pandemi Covid-19 melanda Dunia, Indonesia mendapatkan dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian negaranya, namun pada periode 2021 hingga 2022 Indonesia sedang berupaya penuh untuk meningkatkan maupun memulihkan perekonomian yang salah satunya berfokus pada sektor pariwisata (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023).

Sektor Pariwisata bagi Indonesia merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting terhadap penumbuhan perekonomian negara, baik hal tersebut dapat menjadi sumber devisa negara maupun sebagai lapangan kerja yang memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat memerlukan. Bagi Indonesia sendiri, pariwisata merupakan sebuah sektor strategis yang memiliki peran cukup

penting dalam upaya pembangunan ekonomi negara maupun sebagai elemen pemerataan pembangunan yang berdasarkan pada aspek kewilayahan. (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023)

Berdasarkan peran dan kontribusi tersebutlah yang menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor yang terbilang memiliki potensi cukup besar untuk dikembangkan, tentunya hal ini dapat berperan sebagai lokomotif terhadap upaya pengembangan maupun pembangunan negara serta pemberdayaan masyarakat dalam tujuan meningkatkan perekonomian negara melalui sektor pariwisata (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023).

Dalam upaya menumbuhkan perekonomian negara melalui sektor Pariwisata, Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya melalui pembuatan kebijakan-kebijakan terkait pariwisata di Indonesia, namun hal tersebut masih ternilai kurang maksimal dalam efektivitas untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, terlebih lagi pasca Indonesia di landa pandemi Covid-19.

Dari hal tersebut diperlukanya kebijakan lain yang lebih efektif dalam upaya meningkatkan sektor pariwisata di Indonesia, yang salah satunya ialah melalui kerja sama, kerja sama tersebut dilakukan baik dengan para aktor negara maupun dengan para aktor non-negara. Hal tersebut dikarenakan perlunya bentuk dukungan yang diperlukan dalam rangka pengembangan sektor pariwisata di Indonesia pada periode 2021 – 2022, yaitu dengan adanya kerja sama antara Indonesia dengan United Nation World Tourism Organization (UNWTO).

Indonesia memiliki berbagai macam destinasi wisata yang masing-masing memiliki keistimewaan tersendiri, dimulai dari Pulau Bali yang memiliki beragam keindahan alam maupun destinasi wisata seni dan budaya serta kekayaan tradisi

yang dikenal oleh masyarakat domestik maupun mancanegara, Bali sebagai salah satu ikonis unggulan destinasi pariwisata milik Indonesia yang menyabet gelar sebagai destinasi terpopuler Asia dalam penghargaan Travelers' Choice Best Of The Best 2022 (Indonesia Travel, 2022).

Usaha pengembangan sektor pariwisata di Indonesia juga dilakukan dalam agenda program kerja pemerintah yang dilaksanakan oleh kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif, hal ini dilakukan bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan devisa negara saja, namun juga untuk menjadi pemicu laju pertumbuhan ekonomi, sosial, maupun budaya masyarakat di sekitar kawasan pariwisata, Menyikapi pengembangan pariwisata dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapat Asli Daerah (PAD) (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023).

Indonesia merupakan negara yang juga mengandalkan sektor pariwisata terhadap pertumbuhan maupun pengembangan ekonomi negara, melakukan berbagai upaya maupun usaha dalam mempromosikan pariwisatanya dengan menggunakan pariwisata dan gastronomi (Kemenparekraf, 2023).

Wisata Gastronomi merupakan salah satu contoh dari produk pariwisata berkelanjutan, dan hal ini tergabung dalam bagian ekonomi inovatif maupun kreatif, yang mana Gastronomi didefinisikan sebagai atraksi wisata yang berkaitan dengan suatu hidangan, melalui hal yang berkaitan dengan hidangan tersebut juga menjadi refleksi terhadap sebuah sejarah, tradisi, budaya, beserta faktor lingkungan yang kemudian dapat memberi pengaruh terhadap definisi identitas suatu budaya.

Tentunya dari beragam budaya yang dimiliki oleh Indonesia, menjadi sebuah keunggulan tersendiri yang dimiliki oleh Indonesia yang menjadikan Pemerintah terus berupaya untuk dapat menumbuhkan serta mengembangkan

sektor pariwisata dan gastronomi tersebut melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

Dalam proses penumbuhan serta mewujudkan majunya perekonomian Indonesia melalui sektor pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bekerjasama dengan United Nations World Tourism Organization (UNWTO), Kerja sama tersebut terjalin melalui keanggotaan Indonesia dalam badan organisasi UNWTO.

UNWTO adalah sebuah organisasi pariwisata dunia yang merupakan badan dari PBB, tujuan utama UNWTO ialah untuk meningkatkan maupun membangun pariwisata sebagai kontributor dalam pembangunan ekonomi, Indonesia telah tergabung dalam keanggotaan UNWTO sejak tahun 1975 dan menjadi salah satu negara pertama yang masuk kedalam keanggotaan UNWTO (Kemlu RI, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2022).

Penelitian ini berfokus pada impelentasi yang diberikan oleh UNWTO terhadap pengembangan sektor pariwisata Indonesia pada kurun waktu tahun 2021 - 2022. Sebagai sebuah organisasi internasional UNWTO memiliki peran sebagai wadah untuk menggalang kerjasama dan mencegah intensitas konflik untuk sesama anggota.

Dalam upaya mewujudkan pengertian kepada seluruh masyarakat Internasional, Perdamaian, Kemakmuran Universal, HAM beserta kebebasan dasar untuk semua kalangan tanpa memandang perbedaan ras, jenis kelamin, bahasa maupun agama. UNWTO menjadi pendukung maupun berperan dalam membantu para anggotanya dalam Industri pariwisata dunia, yang menjadi faktor penting

dalam perkembangan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan (United Nations World Tourism Organization, 2023).

Selain itu UNWTO juga menyediakan insentif bagi pembangunan lingkungan dan warisan sejarah, serta tujuan terpenting ialah untuk mendukung perdamaian dan saling pengertian antar negara di Dunia. Kerja sama yang dibangun Indonesia di forum Internasional seperti UNWTO sangatlah penting, terutama kerjasama tersebut dalam tujuan untuk menjalin kerja sama pelatihan, penanaman modal, dan tukar-menukar pengalaman (United Nations World Tourism Organization, 2023).

Bentuk kerjasama nyata yang dilakukan antara Pemerintah Indonesia dengan UNWTO ialah kerjasama dalam bidang pariwisata yang mendukung pembangunan berkelanjutan yang menjadi proyek *Sustainable tourism through energy efficiency with Adaption and Mitigation Measures* (STREAM). Indonesia juga mendapatkan dukungan yang diberikan oleh *Executive Council* UNWTO dan menjadikan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sebagai *Focal Point* UNWTO di Indonesia (Kemlu RI, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2022).

Contoh lain dukungan yang diberikan oleh *Executive Council* UNWTO yang diterima baik oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia ialah berupa pemberian dukungan penuh terhadap masyarakat pariwisata Indonesia untuk menjadi anggota UNWTO Business Council. dimana Business Council tersebut adalah badan-badan yang beranggotakan aktor non-pemerintah (United Nations World Tourism Organization, 2023).

Mengingat pariwisata merupakan bisnis yang sangat kompleks dan memerlukan peran swasta serta masyarakat untuk menjamin keberhasilannya, maka kontribusi masyarakat juga sangatlah diperlukan dalam berjalanya pembangunan sektor pariwisata. Dari hal ini, penulis memiliki fokus tujuan dalam melihat dan menemukan kerjasama yang terjalin antara negara Indonesia dengan UNWTO, dan tentunya untuk menemukan implementasi yang diberikan oleh UNWTO terhadap pengembangan sektor pariwisata Indonesia pada tahun 2021 – 2022.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana implementasi *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO) dalam rangka mendukung sektor pariwisata di Indonesia pada tahun 2021 - 2022 ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- A. Untuk mengetahui secara singkat sejarah UNWTO.
- B. Untuk mengetahui dan menemukan implementasi UNWTO dalam rangka mendukung sektor pariwisata Indonesia pada tahun 2021 – 2022.

## **1.4 Cakupan penelitian**

Pada penelitian ini memiliki fokus terhadap bentuk Implementasi *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO) terhadap sektor pariwisata di Indonesia pada tahun 2021 – 2022. Alasan penulis memilih tahun 2021 hingga 2022 menjadi jangkauan waktu dalam penelitian ini ialah dikarenakan terdapat efek pasca pandemi Covid-19 yang masih melanda Dunia, hampir seluruh negara di

Dunia membangun kerjasama dalam upaya pemulihan ekonomi negara pasca pandemi Covid-19 termasuk salah satunya ialah Indonesia. Berbagai sektor ekonomi pada masing-masing negara mengalami kendala tersendiri dalam proses pemulihan ekonomi pasca pandemi tersebut, salah satunya ialah sektor pariwisata.

Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki banyak potensi yang berasal dari sektor pariwisata, melalui kebijakan yang dilakukan oleh kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) yang memiliki fokus tujuan untuk membangun dan mengembangkan sektor pariwisata guna dapat merangsang laju pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih baik (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023).

Dalam upaya pengembangan sektor pariwisata Indonesia, cakupan ini terfokus pada kerjasama yang terjalin antara Indonesia dengan *United Nations World Tourism Organization*, dan melihat implementasi apa saja yang diberikan oleh UNWTO dalam rangka mendukung sektor pariwisata Indonesia pada periode 2021 - 2022.

## **1.5 Tinjauan Pustaka**

Pada jurnal yang berjudul "*The Role Of UNWTO As An International Organization in Addressing the Impact Of Covid-19 On Indonesian Tourism*" (Amirullah, 2021), mengungkapkan bahwa sejak pertama terkonfirmasi virus Covid-19 di Indonesia, Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menangani virus covid-19, salah satunya ialah pemerintah menerapkan program pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, akibat kebijakan ini, sektor yang terkena dampak langsung adalah sektor pariwisata.



Disebutkan juga bahwasanya pada tulisan tersebut, menjelaskan mengenai kerugian yang dialami dan mengakibatkan banyak orang yang bekerja di sektor perjalanan maupun pariwisata harus terpaksa berhenti bekerja karena tidak adanya kegiatan pariwisata. Dimana di Di Indonesia sektor pariwisata merupakan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja hingga 13 Juta orang, dampak selanjutnya ialah mereka akhirnya tidak mendapatkan penghasilan untuk menopang kehidupan mereka (Amirullah, 2021).

Kesamaan pendapat juga di ungkapkan oleh NM Ernawati, NM Sudarmini, dan NMR Sukmawati pada jurnalnya yang berjudul “*Impact Covid On Ubud Bali*” (NM Ernawati, 2022), Mereka bertiga menguraikan bahwasanya Covid-19 memberikan dampak kerugian yang cukup signifikan terhadap sektor pariwisata di Ubud Bali.

Kedua jurnal tersebut memiliki kesamaan dalam melihat fokus penelitian pada peran UNWTO dalam penanganan krisis yang terjadi pada sektor pariwisata disaat pandemi Covid-19, namun keduanya tidak menjelaskan secara spesifik peran maupun pengaruh yang diberikan UNWTO pada pembenahan situasi di sektor pariwisata.

Lalu terdapat pula ungkapan dari Amalya Khalisha Nur El pada jurnalnya yang berjudul “Pengaruh The United Nations World Tourism Organization (UNWTO) dalam melaksanakan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Pangandaran, Indonesia.” (EL, 2021) dimana pada jurnal tersebut memberikan penjelasan peran UNWTO terhadap pembangunan pariwisata berkelanjutan di Pangandaran, Indonesia.

Hambatan khusus mengenai pembangunan serta pariwisata pada saat pandemi Covid-19 diungkapkan oleh kedua Jurnal sebelumnya, dimana pada awal tahun 2020 terdapat krisis yang memberikan dampak besar terhadap berjalanya sektor pariwisata di Indonesia dan diperlukanya bantuan ataupun peran yang berasal dari UNWTO.

Jurnal-jurnal yang tercantum diatas sebagian besar menggambarkan posisi UNWTO sebagai lembaga Internasional yang memiliki peran dalam pembangunan ataupun pengembangan sektor pariwisata di Indonesia. Selain itu, kompleksnya hambatan yang terjadi ialah terpuncak pada kurun waktu sekitar tahun 2020 hingga 2021 yang diakibatkan dampak dari pandemi virus Covid-19.

Pada 3 jurnal pada pembahasan sebelumnya, cakupan penelitian yang dilakukan ialah pada tahun 2018, 2020, dan 2021. Namun ketiga jurnal tersebut hanya memfokuskan pembahasan kepada satu objek sebagai pembahasan, dengan demikian penulis akan menggali lebih lanjut mengenai implementasi yang diberikan oleh UNWTO dalam rangka mendukung sektor pariwisata di Indonesia secara menyeluruh pada tahun 2021 hingga 2022.

Dengan tujuan agar tulisan ini dapat memberikan literatur berupa informasi tentang implementasi UNWTO dalam membantu pembangunan serta pengembangan sektor pariwisata di Indonesia dalam kurun waktu 1 tahun.

## **1.6 Kerangka Pemikiran**

Dalam proses menganalisis penelitian mengenai implementasi United Nations world Tourism Organization (UNWTO) dalam rangka mendukung sektor

pariwisata di Indonesia pada tahun 2021-2022, peneliti menggunakan teori Implementasi Organisasi Internasional (Joachim, 2008).

Menurut Jutta Joachim seorang Profesor ilmu politik di Leibniz University Hannover, German. Beserta kedua rekanya yaitu Bob Reinalda seorang Dosen Senior Hubungan Internasional di Departemen Ilmu Politik Radboud University Nijmegen, Netherland. Dan Bertjan Verbeek seorang Profesor Studi Hubungan Internasional di Radboud University Nijmegen, Netherland.

Pada saat ini, organisasi internasional memiliki peranan yang cukup penting dalam tatanan dunia global, penjelasan terkait implementasi secara luas dapat didefinisikan yang mengacu pada penerjemahan dari perjanjian internasional yang telah disepakati menjadi sebuah kebijakan konkret dan sebagai perwujudan dalam penerapan aturan ataupun regulasi, pengesahan undang-undang atau pembentukan lembaga (baik domestik maupun internasional) (Joachim, 2008).

Implementasi memiliki makna berbeda apabila dibandingkan dengan kepatuhan maupun efektivitas, walaupun seringkali kedua pemaknaan tersebut digunakan secara bergantian. Implementasi memiliki fokus dalam memperhatikan secara lebih rinci terhadap berbagai tindakan konkret yang berhasil ataupun gagal diperoleh para aktor untuk memenuhi perjanjian internasional, hal ini menjadikannya bersifat dinamis dikarenakan dapat mengendalikan mobilisasi sumber daya dari para aktor yang terlibat, yang dimisalkan ialah organisasi internasional (Joachim, 2008).

Organisasi internasional merupakan salah satu aktor penting bertanggung jawab terhadap terjadinya implementasi, meskipun pemerintah tetaplah menjadi aktor yang tidak kalah penting karena memiliki peran otoritas nasional dalam

menjadi fasilitator bagi implementasi agar dapat dilaksanakan di tingkat domestik (Joachim, 2008).

Hal ini memiliki perbedaan dengan kepatuhan yang didefinisikan sebagai perilaku yang sesuai dengan yang telah ditentukan. Berbeda pula dengan efektivitas yang dapat diartikan sebagai suatu hal yang berkaitan dengan dampak kebijakan yang disepakati secara internasional, hal tersebut dapat juga didefinisikan sebagai tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana suatu aturan dapat berperan terhadap terciptanya sebuah perubahan, sejauh mana aturan dapat berperan dalam meningkatkan keadaan untuk mencapai tujuan kebijakan (Joachim, 2008).

Meskipun memiliki konsep yang berbeda antara kepatuhan, efektivitas, dan implementasi namun juga tidak sepenuhnya tidak terkait. Dalam upaya mewujudkan negara yang dapat sejalan dengan perjanjian internasional, mengesahkan undang-undang atau mendirikan lembaga baru mungkin merupakan langkah yang perlu untuk dilaksanakan. Dengan kata lain, kurangnya efektivitas ataupun kepatuhan memberi kemungkinan bahwasanya diperlukan peran aktor yang bertanggung jawab untuk berbuat lebih banyak dalam hal implementasi (Joachim, 2008).

Terdapat beberapa *instrument* atau biasa disebut sebagai pendekatan yang dimiliki oleh organisasi internasional, dalam tujuan untuk memastikan implementasi dari perjanjian internasional pada level domestik, di antaranya ialah sumber daya kelembagaan serta faktor tingkat domestik.

	<i>Enforcement approach</i>	<i>Management approach</i>	<i>Normative approach</i>
<b>Resources</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Naming and shaming</i>, i.e., judging on the basis of state reporting, expert committees, inspections or NGO reports</li> <li>• <i>Sanctions</i>, e.g. economic or military sanctions, adjudication financial penalties, or naming and shaming</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Monitoring</i> on the basis of state reporting, expert committees, inspections, or NGO reports</li> <li>• <i>Capacity building and problem solving</i> through expert advice, rule interpretation, financial or technical assistance</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Authority and legitimacy</i></li> </ul>

**Tabel 1. 3 Macam Instrument Organisasi Internasional (Joachim, 2008)**

Untuk yang pertama yaitu adalah *enforcement* yang menjelaskan bahwasanya kepatuhan terhadap perjanjian internasional paling baik dijamin melalui cara-cara koersif. Mengutip wawasan yang bersumber dari ekonomi politik, *game theory*, dan *collective action theory*, penegakan hukum berpegang pada prinsip konsekuensialis, dengan asumsi yang memiliki prinsip bahwa negara merupakan aktor rasional yang mempertimbangkan biaya dan keuntungan yang didapatkan (Joachim, 2008).

Pendekatan meyakini bahwasanya organisasi internasional dapat memberi pengaruh terhadap implementasi melalui *naming and shaming*, maupun pemberian sanksi. Konsekuensi ini diberlakukan menggunakan cara menyebarkan pelanggaran yang telah dilakukan oleh negara yang bersangkutan. Sedangkan untuk pemberian sanksi diberlakukan kepada negara yang tidak dapat mematuhi kesepakatan internasional yang telah dibuat oleh organisasi internasional (Joachim, 2008). Sanksi tersebut diberikan dapat dengan berbentuk sanksi ekonomi seperti denda keuangan maupun pembatasan suatu aktivitas ekonomi, ataupun

bahkan dapat berbentuk sanksi militer yang apabila terjadi dapat menimbulkan kerugian bagi negara yang melanggar (Joachim, 2008).

Lalu untuk selanjutnya terdapat point *managerial*, poin ini memiliki fokus terhadap pemantauan terhadap perilaku para pihak yang telah berada dalam sebuah perjanjian internasional. Salah satu bentuk pemantauan sebagai contoh ialah dengan pemberian laporan kemajuan rutin tentang kegiatan yang dilaksanakan sebuah negara di tingkat nasional kepada organisasi internasional selaku pengawas proses implementasi (Joachim, 2008).

Perspektif ini berpendapat bahwasanya aktor lain seperti organisasi internasional, birokrasi, maupun agen lainnya dapat berperan dan memberikan kontribusi dalam melakukan implementasi perjanjian internasional melalui pemantauan terhadap negara dan melaksanakan pengembangan kapasitas melalui pemberian pelatihan, pemberian bantuan keuangan atau teknis, melakukan transparansi, maupun pemberian saran yang berasal dari ahli (Joachim, 2008).

Maka dari itu, perspektif *managerial* ini lebih berfokus pada pencarian solusi melalui analisis yang dilakukan antara organisasi internasional dan negara beserta agensi lainnya (Joachim, 2008).

Dalam konteks *monitoring* terdapat beberapa bentuk yang dilakukan oleh organisasi internasional. Untuk bentuk *monitoring* yang pertama, ialah dengan melakukan laporan kemajuan rutin yang berisikan tentang kegiatan yang berlangsung di level nasional. Selanjutnya bentuk *monitoring* yang kedua, membentuk sebuah badan pengawas sebagai salah satu cara pengawasan terhadap kegiatan negara anggota (Joachim, 2008).

Lalu bentuk *monitoring* yang ketiga, dilakukannya pengiriman perwakilan untuk mendatangi negara anggota yang dituju dalam tujuan pengawasan dan penilaian langsung terhadap proses pemerintah memenuhi komitmen internasionalnya. Dan bentuk *monitoring* yang keempat, melakukan sebuah pengawasan dengan mengandalkan “laporan bayangan” yang diberikan oleh aktor lain seperti LSM untuk menilai kemajuan negara anggota dalam menerapkan implementasi kebijakan internasional (Joachim, 2008).

Untuk yang terakhir terdapat sebuah pendekatan yaitu *Normative* atau biasa yang disebut sebagai perspektif normatif. Perspektif ini sangat dekat dengan pendekatan konstruktivis, perspektif normatif menjelaskan bahwasanya organisasi internasional memiliki kepercayaan bahwasanya sebuah negara merupakan aktor yang penting dan memiliki otoritas (Joachim, 2008).

Organisasi internasional membagi otoritas tersebut menjadi dua sumber, di antaranya ialah kontrol terhadap informasi yang menempatkan negara sebagai instansi yang memiliki keunggulan atas informasi yang telah dimilikinya dibandingkan dengan negara lain, serta melalui kepercayaan negara terhadap organisasi internasional sebagai aktor yang rasional dan dipandang sebagai agen yang tidak parsial (Joachim, 2008).

Lalu selanjutnya yaitu faktor domestik, faktor ini mendasari suatu negara untuk mengambil maupun tidak mengambil tindakan tingkat nasional yang tergantung pada kekuatan kelompok yang akan terpengaruh secara positif ataupun negatif oleh perjanjian internasional yang bersangkutan (Joachim, 2008). Pendekatan ini tidaklah secara eksplisit berhubungan dengan pendekatan-

pendekatan sebelumnya, dikarenakan pendekatan normatif ini lebih berfokus terhadap kebutuhan domestik yang ada disuatu negara (Joachim, 2008).

Misalnya, apabila terdapat suatu aturan yang diterapkan oleh organisasi internasional mengharuskan negara anggotanya untuk melakukan penyesuaian dengan merubah struktur atau prosedur administrasi yang ada, maka hal tersebut dapat menjadi hambatan untuk dapat melaksanakan implementasi kebijakan (Joachim, 2008).

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan *managerial* untuk menjadi metode penganalisisan yang baik terhadap studi kasus implementasi United World Tourism Organization dalam rangka mendukung sektor pariwisata Indonesia pada tahun 2021-2022.

Alasan penulis menggunakan pendekatan *managerial* untuk menjadi metode penganalisisan ialah karena dapat menemukan secara tepat mengenai bentuk implementasi yang diberikan oleh UNWTO dalam rangka mendukung sektor pariwisata di Indonesia pada periode 2021- 2022.

Hal yang menjadi indikator-indikator dalam metode analisis ini ialah berfokuskan pada implementasi yang diberikan oleh UNWTO kepada sektor pariwisata Indonesia, hal ini menjadi bagian dari implementasi sebuah organisasi internasional kepada para negara anggotanya.

Dengan ini penulis ingin membuktikan bahwasanya melalui kerjasama yang terbentuk antara aktor negara dengan organisasi internasional, apakah memang memberikan dampak keuntungan berdasarkan implementasi yang diberikan oleh organisasi internasional tersebut.



## **1.7 Argumen Sementara**

Jika dilihat melalui konsep Implementasi Organisasi Internasional, bentuk implementasi yang diberikan UNWTO terhadap pengembangan sektor pariwisata Indonesia pada tahun 2021 – 2022 ialah dalam bentuk pemberian fasilitas dalam mempromosikan sektor pariwisata di Indonesia kepada masyarakat internasional, serta pemberian bantuan berupa modal maupun dengan bentuk sumber daya lain yang diperlukan oleh Indonesia.

Melalui peran implementasi yang dimiliki oleh UNWTO terhadap pengembangan sektor pariwisata Dunia, keberadaan UNWTO tersebut memberikan sebuah pengaruh positif yang besar dan berperan terhadap sektor pariwisata di Dunia, dan tentunya melalui keberadaan UNWTO tersebut menjadi bentuk nyata adanya keberadaan kepedulian internasional (United Nations World Tourism Organization, 2023).

## **1.8 Metode Penelitian**

### *1.8.1 Jenis Penelitian*

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif melalui analisis deskriptif, melalui jenis penelitian ini, penulis dapat menjabarkan secara detail dan mendalam mengenai kontribusi UNWTO dalam membantu sektor pariwisata di Indonesia pada tahun 2021 – 2022.

### *1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian*

Dalam penelitian ini, subjek yang menjadi fokus dalam analisis penulis ialah United Nations World Tourism Organization. Hal yang penulis spesifikasikan ialah mengenai hubungan kerjasama yang terjalin antara UNWTO dengan Negara Republik Indonesia terhadap sektor pariwisata di Indonesia.

Selanjutnya terhadap objek pada penelitian ini ialah berfokus pada implementasi yang diberikan oleh United Nations World Tourism terhadap sektor pariwisata di Indonesia periode 2021-2022.

### *1.8.3 Metode Pengumpulan Data*

Jenis metode yang penulis gunakan dalam mencari sumber-sumber referensi maupun acuan dalam mencapai tujuan penelitian ini ialah melalui metode kualitatif. Hal yang menjadi dasar penulis menggunakan metode kualitatif ialah bahwasanya penulis menyadari adanya perkembangan yang pesat dalam dunia digital maupun teknologi komunikasi yang memungkinkan mudahnya mendapat data sebagai sumber literatur.

Dengan menggunakan metode penelitian yakni kualitatif, penulis memiliki harapan untuk dapat memberikan sebuah data yang relevan dan komprehensif terhadap tujuan penelitian ini, yang diharapkan dapat menjadi penelitian yang baik dan memberikan sebuah hasil yang sesuai dengan harapan.

### *1.8.4 Proses Penelitian*

Terhadap proses penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam mencapai tujuan dari penelitian ini ialah melalui adanya pengumpulan data yang

dilakukan melalui pencarian data menggunakan media digital seperti internet, dan sumber lain semacanya dalam dunia digital.

Lalu selanjutnya penulis juga mengupayakan proses penelitian ini melalui pencarian data yang akan digunakan melalui adanya pengumpulan data melalui pengajuan permintaan data relevan pada pihak yang berperan dalam sektor pariwisata di Indonesia contohnya ialah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia maupun Kementerian Luar Negeri Indonesia.

## **1.9 Sistematika Pembahasan**

Bab 1 memaparkan latar belakang mengenai keterkaitan kerja sama antara sektor pariwisata di Indonesia dengan United Nations World Tourism Organizations (UNWTO), serta sedikit menuangkan implementasi UNWTO sebagai organisasi internasional dalam rangka mendukung sektor pariwisata Negara Republik Indonesia.

Bab 2 memberikan pembahasan mengenai data-data beserta informasi relevan serta komprehensif mengenai sejarah singkat United Nations World Tourism Organization (UNWTO), implementasi yang diberikan oleh UNWTO kepada pengembangan sektor pariwisata Indonesia pada era sebelum tahun 2021, dan tantangan sektor pariwisata saat pandemi Covid-19.

Bab 3 menampilkan data serta analisis mengenai implementasi UNWTO dalam rangka mendukung sektor pariwisata di Indonesia pada tahun 2021-2022 dengan menggunakan pendekatan *managerial* pada teori Implementasi Organisasi Internasional. Pada bagian ini, penulis berupaya untuk menjelaskan penerapan teori

Implementasi Organisasi Internasional dalam upaya menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.

Bab 4 merupakan bagian kesimpulan yang menjadi akhir pada penelitian ini yang memberikan kesimpulan atas rangkuman dari setiap bagian yang memberikan jawaban atas implementasi yang diberikan UNWTO kepada sektor pariwisata di Indonesia periode 2021-2022.

## BAB 2

### PROFIL UNWTO DAN PENGARUHNYA PADA SEKTOR PARIWISATA INDONESIA

#### 2.1. United Nations World Tourism Organization (UNWTO)

*United Nations World Tourism Organization* adalah organisasi internasional yang merupakan badan khusus Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). UNWTO memiliki fokus terhadap pembentukannya sebagai organisasi internasional dengan tujuan untuk memajukan pariwisata dunia serta menjadi penggerak terhadap pemanfaatan pariwisata sebagai suatu komponen penting terhadap pengembangan pasar ekonomi internasional serta menjadi sebuah strategi pembangunan ekonomi terhadap negara-negara berkembang (United Nations World Tourism Organization, 2023).

UNWTO memiliki tugas khusus untuk menangani bidang pariwisata di negara-negara anggota, UNWTO memberikan pengetahuan pasar, mempromosikan kebijakan maupun instrumen pariwisata yang kompetitif dan berkelanjutan, selain itu UNWTO menjadi pelopor terhadap pengembangan Pendidikan dan pelatihan pariwisata. UNWTO bekerja untuk mewujudkan pariwisata dapat menjadi alat yang efektif untuk pembangunan ekonomi global melalui proyek bantuan teknis yang berada pada lebih dari 100 negara di seluruh dunia (United Nations World Tourism Organization, 2023).

UNWTO memiliki anggota sebanyak 156 negara, 6 wilayah dan lebih dari 400 anggota afiliasi yang mewakili sektor swasta, lembaga Pendidikan, asosiasi pariwisata dan otoritas pariwisata setempat. UNWTO memiliki kantor pusat yang

terletak di Kota Madrid, Spanyol (United Nations World Tourism Organization, 2023). Pada awal mula terbentuknya United Nations World Tourism Organization memiliki nama yaitu *International Union of Official Tourist Publicity Organization*, Organisasi Internasional ini resmi terbentuk pada tahun 1925 dan memiliki markas besar yang berlokasi di Den Haag, Belanda. Beberapa tahun kemudian setelah berakhirnya perang dunia II yang tepatnya pada tahun 1934, nama organisasi diubah menjadi *International Union for Official Tourism Organization (IUOTO)* dan untuk markas besarnya dipindahkan ke Jenewa, Swiss (United Nations World Tourism Organization, 2023).

IUOTO atau UNWTO pada saat itu merupakan sebuah organisasi internasional non-pemerintah yang menggait badan-badan pariwisata negara-negara di Dunia. Namun seiring berjalanya waktu, menjelang akhir tahun 1960-an IUTO atau UNWTO pada saat itu mengeluarkan sebuah rekomendasi untuk mengubah organisasinya menjadi sebuah organisasi internasional antar pemerintah, hal ini berlatar belakang pada kesadaran IUTO atau UNWTO pada saat itu yang memerlukan sebuah transformasi lebih lanjut demi tujuan meningkatkan peranya di tingkat internasional (United Nations World Tourism Organization, 2023).

Pada tahun 1967, IUTO atau UNWTO pada saat itu mulai melakukan gerakan untuk mengubah organisasinya menjadi sebuah organisasi internasional antar pemerintah. Melalui gagasan serta gerakan maka dilakukanlah sidang umum ke 20 pada tahun 1967 yang berlokasi di Tokyo. Pada sidang ke 20 ini berisi tentang pernyataan terhadap kebutuhan untuk penciptaan sebuah badan antar pemerintah dengan kemampuan yang diperlukan untuk dapat berfungsi di tingkat internasional

dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional lainnya, khususnya PBB (United Nations World Tourism Organization, 2023).

Sepanjang berjalanya IUTO atau UNWTO pada saat itu, hubungan dekat telah terbentuk antara IUTO dengan PBB. Berdasarkan pada hubungan yang terjalin, IUTO disarankan untuk menjadi bagian dari PBB, walau diperlukannya waktu untuk pertimbangan, dikarenakan berdasarkan sirkulasi rancangan konvensi, konsensus menyatakan bahwa setiap organisasi internasional antar pemerintah yang terbentuk harus terkait erat dengan PBB, dan diwajibkan melengkapi administrasi dan laporan keuangannya (United Nations World Tourism Organization, 2023).

Pada akhirnya, berdasarkan gerakan IUTO atau UNWTO pada saat itu untuk merubah badan organisasi yang sebelumnya non-pemerintah menjadi organisasi internasional antar pemerintah. United Nations World Tourism Organization (UNWTO) resmi berdiri sebagai organisasi internasional antar pemerintah pada tahun 1974, dengan markas besar yang berlokasi di Madrid, Spanyol. Berlanjut pada sidang *Executive Council* UNWTO di Jordani pada tahun 2002, dicapai kesepakatan untuk menjadikan UNWTO sebagai *Specialized Agencies* (Badan khusus) PBB (United Nations World Tourism Organization, 2023).

## **2.2. Kiprah UNWTO di Indonesia Era Sebelum 2021**

Peran sektor pariwisata terhadap peningkatan perekonomian negara dinilai menjadi komponen penting, baik hal tersebut menjadi salah satu sumber devisa negara maupun sebagai sarana lapangan pekerjaan. Bagi Indonesia, sektor pariwisata telah menjadi sektor strategis terhadap tujuan untuk memperkuat serta

meningkatkan perekonomian negara, maupun menjadi elemen pembangunan melalui aspek kewilayahan (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023).

Upaya pengembangan sektor pariwisata tidak luput dari adanya Kerjasama yang terjalin antara Indonesia dengan UNWTO, dan cukup banyak peran maupun kontribusi UNWTO yang telah ada dalam upaya mendukung pengembangan sektor pariwisata di Indonesia. Berikut akan penulis tuangkan beberapa kiprah UNWTO dalam membantu sektor pariwisata Indonesia pada era sebelum tahun 2021.

Untuk yang pertama ialah kerjasama yang terjalin melalui kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan UNWTO pada 13 Juni 2011, pada kesepakatan tersebut menghasilkan sebuah kerjasama yang memiliki tujuan untuk merevitalisasi destinasi kawasan pariwisata Pangandaran (Anggraini, 2015). Hal ini berlatar belakang akibat dari bencana gempa dan tsunami yang melanda daerah Pangandaran dan sekitarnya pada 17 Juli 2006, bencana alam tersebut sepenuhnya memberi dampak kerusakan terhadap kawasan pariwisata Pangandaran.

Pada saat itu kawasan destinasi pariwisata pantai Pangandaran mengalami dampak terparah akibat gelombang tsunami yang melanda, hal tersebut mengakibatkan penurunan drastis angka wisatawan yang dalam perhitungan mencapai 70% (Anggraini, 2015). Dari penurunan angka wisatawan yang sangat drastis tersebut memberikan dampak terhadap pendapatan para masyarakat lokal yang saat itu sangat bergantung pada obyek wisata Pangandaran maupun dampaknya yang berimbas pada devisa negara.

Melalui kesepakatan kerjasama yang terbentuk antara pemerintah Indonesia dengan UNWTO, UNWTO bersedia untuk memberikan peranya terhadap revitalisasi destinasi kawasan pariwisata Pangandaran. Terbentuknya kerjasama



antara pemerintah Indonesia dengan UNWTO dalam pengembangan sektor pariwisata di Pangandaran tersebut merupakan cerminan dari tujuan UNWTO, dimana tujuan tersebut ialah meningkatkan sektor pariwisata sebagai kontributor terhadap pembangunan ekonomi suatu negara, menciptakan rasa saling pengertian internasional, perdamaian, kemakmuran universal, HAM dan kebebasan dasar terhadap seluruh masyarakat Dunia tanpa memandang ras, jenis kelamin, maupun agama (United Nations World Tourism Organization, 2023).

UNWTO melaksanakan berbagai program yang memiliki tujuan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia, pada saat itu UNWTO sedang mempromosikan program ekowisata yang menjadi salah satu obyek penarik bagi para wisatawan (United Nations World Tourism Organization, 2023), disamping dalam tujuan untuk menarik para wisatawan, program ekowisata adalah sebuah program yang memiliki dasar untuk melestarikan alam yang tidak hanya dilakukan di Indonesia, namun juga di negara-negara lainnya.

Salah satu program yang hadir dari kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan UNWTO ialah pengembangan dan revitalisasi destinasi kawasan pariwisata di Pangandaran yang mendukung ide pembangunan berkelanjutan yaitu *Sustainable Tourism Through Energy Efficiency with Adaptation and Mitigation Measures* “STREAM” (Anggraini, 2015).

Stream atau bisa disebutkan sebagai pariwisata berkelanjutan yang menggunakan energi efisiensi melalui kegiatan adaptasi dan mitigasi merupakan proyek kerjasama dalam upaya memerangi perubahan iklim di Indonesia, mengingat kawasan Pangandaran memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi

terhadap dampak dari perubahan iklim maka program Stream yang dijalankan oleh UNWTO dinilai sangatlah tepat.

Proyek tersebut merupakan bagian dari *International Climate Change (ICI)* yang juga didukung oleh kementerian lingkungan hidup, konservasi alam, bangunan, dan keselamatan Nuklir Jerman (*Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety*) (Anggraini, 2015). Partisipasi ICI dalam proyek ini bertujuan untuk mendukung perlindungan iklim di negara-negara industri baru dan transisi sehingga dapat secara efektif berkontribusi pada pengurangan emisi karbon dan adaptasi perubahan iklim (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023).

Dalam proyek yang dijalankan oleh UNWTO atas kesepakatan yang telah terjalin dengan pemerintah Indonesia dalam upaya merevitalisasi kawasan pariwisata Pangandaran, dijalankanlah kerjasama konsorsium yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan beberapa mitra. Peran dan posisi UNWTO pada proyek tersebut sebagai kordinator utama sekaligus menjadi badan pelaksana dan Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai badan perwakilan pemerintah Indonesia.

Aktor-aktor yang ikut berperan dalam proyek tersebut berkat hasil kerjasama dengan lembaga-lembaga non-profit yaitu seperti Indecon, IESR "*Institute for Essential Services Reform*", serta Adelphi sebagai tenaga ahli yang berbasis di Berlin, Jerman (Anggraini, 2015). Selain tersebut juga terdapat mitra lokal pada proyek tersebut seperti partisipasi yang melibatkan pemerintah provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Ciamis, LWG, Komite *Destination Management Organization*, dan masyarakat Pangandaran (Anggraini, 2015).

Kegiatan utama dalam proyek Stream di Pangandaran pada saat itu ialah mencakup kegiatan mitigasi dan adaptasi, dalam kegiatan mitigasi terdapat dua kegiatan pokok yang dilaksanakan. Yaitu reduksi emisi karbon di industri hotel dan pengembangan energi terbarukan untuk fasilitas pariwisata. Sedangkan disisi kegiatan adaptasi terdapat tiga kegiatan pokok, yaitu penanaman mangrove dan terumbu karang, peningkatan kesadaran publik, dan peningkatan kapasitas untuk perencanaan tanggap terhadap perubahan iklim (Anggraini, 2015).

Dalam rangka revitalisasi dan pengembangan sektor pariwisata di Pangandaran, kerjasama yang telah terbentuk antara pemerintah Indonesia dengan UNWTO selama 3 tahun yaitu terhitung sejak tahun 2011 hingga tahun 2013. Melalui proyek Stream tersebut dinilai berhasil, indikator-indikator yang menjadi tanda keberhasilan tersebut dapat dilihat berdasarkan sarana dan prasarana yang telah terbangun jauh lebih layak memadai.

Untuk contoh selanjutnya terkait kiprah UNWTO dalam membantu sektor pariwisata Indonesia pada era sebelum tahun 2021, ialah melalui dukungan yang diberikan dalam upaya pemulihan sektor pariwisata di Indonesia terkait dampak dari pandemi Covid-19. Hal ini berlangsung dalam pelaksanaan Lokakarya *Capacity Building on Restarting International Tourism* di Bali pada 6 - 10 Desember 2020, kegiatan ini berlangsung dalam kerangka *Covid-19 Tourism Recovery Technical Assistance Package* yang disediakan oleh UNWTO (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023).

Pada saat pertemuan tersebut, delegasi dari UNWTO bertemu dengan para aktor penting pemerintah Indonesia, dan menyampaikan kesediaan untuk membantu serta memajukan kembali kolaborasi dengan pemerintah Indonesia

dalam mempersiapkan dibukanya kembali perbatasan Indonesia bagi para pengunjung Internasional dan memulai kembali aktivitas pariwisata (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023).

UNWTO bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melangsungkan Lokakarya mengenai pengembangan kapasitas khusus tentang memulai kembali pariwisata Internasional di Bali (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023). Program ini mendorong seluruh lapisan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan kepariwisataan untuk dapat memberikan pelayanan pariwisata yang terbaik dan profesional. Sebagaimana pada kenyataan yang ada, Bali adalah salah satu kawasan utama pariwisata unggulan yang dimiliki oleh Indonesia.

Dari dampak yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 memberikan penurunan angka wisatawan yang sangat signifikan tentunya juga berpengaruh terhadap Devisa Negara. Melalui Lokakarya yang diselenggarakan oleh UNWTO tersebut mengandalkan partisipasi lebih dari 30 pemimpin dari seluruh pariwisata, Bersama dengan 150 ahli dan pemimpin lainnya yang bergabung melalui komunikasi pertemuan secara virtual (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023).

Diskusi pada Lokakarya tersebut difokuskan terhadap strategi pemerintah untuk memulai kembali pariwisata, termasuk pada pembahasan terkait perumusan kebijakan, prosedur, infrastruktur Kesehatan, dan protokol imigrasi yang diadaptasi untuk dapat menciptakan realitas baru (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023).

Berkat pemberian fasilitas Lokakarya yang berasal dari UNWTO, Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia pada saat itu Mahendra Sinegar memberikan ucapan

terima kasih terhadap kepemimpinan UNWTO selama krisis yang melanda saat pandemi Covid-19 (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023). Melalui hasil Lokakarya dan intensif bantuan yang diberikan oleh UNWTO kepada Indonesia, dieratkanlah kembali kolaborasi antara sektor publik dan swasta yang bekerja sama untuk memulai kembali pariwisata demi kepentingan yang tidak hanya dalam upaya menarik para wisatawan maupun pengunjung untuk datang ke Bali, namun dimulainya aktivitas pariwisata kembali demi tujuan untuk semua pemangku kepentingan yang mencakup para pekerja pariwisata dan penyedia layanan.

Melalui komitmen untuk memulai kembali aktivitas industri pariwisata, terciptalah peningkatan terhadap protokol yang diberikan. Melalui berbagai uraian langkah-langkah yang telah dirancang dan diadaptasi demi terciptanya pariwisata yang aman, dimana hal tersebut terbukti dengan diterbitkannya protokol dan program sertifikasi *Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability* (CHSE) oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Negara Indonesia (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023).

Protokol yang diciptakan tersebut berdasarkan pada protokol yang bersamaan telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Indonesia, dan Kementerian Perhubungan serta oleh UNWTO dan ICAO (*The International Civil Aviation Organization*) (UNWTO, 2020).

Beberapa penjelasan yang telah penulis sampaikan diatas merupakan bentuk dari kontribusi ataupun kiprah UNWTO terhadap pengembangan sektor pariwisata di Indonesia pada era sebelum tahun 2021. Tentunya seperti berdasarkan pada Teori Implementasi Organisasi Internasional melalui pendekatan *Managerial* yang

dikemukakan oleh Jutta Joachim (Joachim, 2008), telah menjelaskan benar adanya bahwasanya Organisasi Internasional seperti UNWTO memberikan sifat yang cenderung terbuka, dimana terdapat kerja sama yang dilakukan oleh berbagai aktor, terdapatnya pengawasan, transparansi, dan tentunya benar memberikan bantuan terhadap pengembangan kapasitas suatu negara.

### **2.3 Tantangan Sektor Pariwisata Saat Pandemi Covid-19**

Pada akhir tahun 2019, Dunia Internasional sedang dilanda oleh krisis yang diakibatkan oleh wabah penyakit yang disebabkan oleh Virus Corona atau biasa dikenal sebagai Covid-19, Virus Covid-19 pertama ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan, Tiongkok. Semakin hari keadaan yang ditimbulkan semakin mengkhawatirkan melihat penyebaran virus Covid-19 tersebut dinilai sangat cepat dan berbahaya, berbagai aspek maupun sektor dalam negeri di setiap belahan Dunia Internasional mengalami perubahan yang sangat mengkhawatirkan (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023).

Berdasarkan perkembangan pesat dari penyebaran Virus Covid-19 menciptakan kekhawatiran yang menyeluruh terhadap seluruh masyarakat Dunia, sangat banyak terjadi kasus kematian yang mencapai 6.951.677 jiwa dan akibat dari dampak yang sangat ekstrim tersebut, wabah penyakit Covid-19 menjadi pusat perhatian banyak negara. Pada tanggal 11 Maret 2020 *World Health Organization* (WHO) menetapkan wabah penyakit Covid-19 sebagai pandemi global (Elistia, 2021).

Berbagai aspek maupun sektor yang mendapatkan dampak kerugian salah satunya ialah sektor perekonomian, pandemi Covid-19 terbukti telah memberikan

tekanan besar terhadap kondisi ekonomi maupun sosial di Dunia yang tentunya Indonesia menjadi salah satu di dalamnya. Indonesia mengalami dampak yang sangat besar terhadap sektor perekonomian akibat Virus Covid-19 sejak akhir tahun 2019 (Elistia, 2021), berdasarkan dampak terhadap sektor perekonomian yang berkembang sangat pesat menjadikan pemerintah Indonesia mengambil langkah agresif dalam tujuan menekan angka penyebaran semaksimal mungkin.

Pemerintah Indonesia menciptakan kebijakan berupa pembatasan sosial sebagai solusi terhadap permasalahan ini, yaitu tertuang pada Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2021 (Elistia, 2021). Walaupun terdapat berbagai langkah strategis yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam penekanan angka penyebaran Virus Covid-19 maupun langkah dalam tujuan menanggulangi dampak di kemudian hari, tetaplah terdapat berbagai tantangan baru yang hadir terhadap berbagai aspek maupun sektor dalam negeri yang salah satunya ialah sektor pariwisata.

Sektor pariwisata yang menjadikan wisatawan sebagai komponen utama dalam proses keberhasilan, memiliki tantangan baru yang hadir melalui pandemi Covid-19 ini, tantangan tersebut salah satunya ialah berdasar pada angka wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara yang turun drastis seiring dengan pengurangan penerbangan Internasional. Berdasarkan pada angka wisatawan yang menurun drastis pada sektor pariwisata memberikan kerugian pada angka pendapatan berbagai bidang pariwisata seperti usaha perhotelan, jasa penerbangan, angkutan darat maupun laut.

Menurut data *World Travel and Tourism Council* di tahun 2020, sektor pariwisata Dunia mengalami kerugian yang menembus hingga mencapai US\$ 4,7 Triliun (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023). Berdasarkan pada

data kontribusi pariwisata terhadap PDB mengalami kerugian sebesar 49,1% hal tersebut sangat berbanding jauh dengan tahun-tahun sebelumnya.

Penurunan drastis ini tidak lain karena diberlakukannya pembatasan mobilitas yang berkelanjutan, disamping hal itu hal buruk yang menjadi bom waktu apabila pariwisata rugi dan tidak dapat pulih dengan baik maka ancaman selanjutnya ialah banyak hilangnya lapangan pekerjaan.

Pada setiap kawasan dalam wilayah pariwisata, terdapat berbagai kekecewaan maupun kelesuan yang dialami oleh hampir seluruh pihak, hal tersebut dialami oleh para pengusaha maupun pekerja yang bergerak di sektor pariwisata seperti contoh pengusaha bidang perjalanan, akomodasi, makanan & minuman, jasa hiburan, maupun kerajinan. Dampak buruk akibat pandemi Covid-19 tersebut menyerang secara merata terhadap setiap usaha dalam skala mikro, kecil, menengah, maupun besar (Elistia, 2021).

Disamping dampak buruk berupa penurunan drastis yang menyerang pendapatan sektor pariwisata di berbagai lapisan, terdapat kemunculan rasa pesimisme yang dialami oleh seluruh masyarakat terhadap masa depan pariwisata, terutama bagi masyarakat daerah yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai mata pencaharian.

Sepanjang waktu sejak ditetapkan virus Covid-19 menjadi pandemi global yang dimulai pada 11 Maret 2020 oleh WHO, hingga saat ini telah diubahnya status pandemi menjadi endemi di Indonesia berdasarkan penetapan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2023), terlihat cukup banyak tantangan yang hadir menyerang sektor pariwisata Dunia maupun khususnya sektor pariwisata Indonesia.



Melalui hal tersebut, Indonesia berupaya penuh dalam membangkitkan kembali sektor pariwisata sebagai salah satu komponen penting pembangunan negara. Dinilai kurang cukup akan adanya upaya yang dilakukan Indonesia apabila terbatas pada kemampuan dalam negeri, maka diperlukanya bantuan melalui adanya organisasi internasional yang disini UNWTO hadir untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

## **BAB 3**

### **IMPLEMENTASI UNITED NATIONS WORLD TOURISM ORGANIZATION TERHADAP PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA INDONESIA 2021 - 2022**

Pada bab 3, penulis akan membahas mengenai Implementasi United World Nations World Tourism Organization terhadap pengembangan sektor pariwisata Indonesia di tahun 2021 hingga 2022. Selain menuangkan penjelasan yang terkait dengan kontribusi UNWTO terhadap pengembangan sektor pariwisata di Indonesia pada tahun 2021 hingga 2022, penulis akan melakukan analisis terhadap kontribusi yang diberikan UNWTO kepada Indonesia melalui konsep implementasi organisasi internasional dengan menggunakan pendekatan *managerial*.

Bab ini menjadi bagian utama dari penelitian yang penulis telah susun dan menjadi bagian yang paling membedakan dengan penelitian lain maupun penelitian sebelumnya, perlu diamati bahwasanya penulis telah menemukan bahwasanya melalui pendekatan *managerial* pada konsep implementasi organisasi internasional, United Nations World Tourism Organization berperan sesuai dengan nilai-nilai pendekatan *Managerial* yang berfokus pada bukti kontribusi UNWTO terhadap pengembangan sektor pariwisata Indonesia di tahun 2021 hingga 2022.

Pendekatan *Managerial* (Joachim, 2008) merupakan satu dari tiga pendekatan yang terdapat pada konsep teori implementasi organisasi internasional. Pada pendekatan *Managerial* (Joachim, 2008) meyakini bahwa keputusan untuk patuh terhadap perjanjian internasional berasal dari interaksi antar aktor terkait

yang sama-sama memiliki tujuan untuk menciptakan keseimbangan dan keuntungan.

Dalam arti lain, dapat dijelaskan bahwasanya persetujuan maupun kesepakatan yang terjalin antara kedua belah pihak dan keuntungan yang merata menjadi fokus utama dalam pendekatan ini. Melalui hal tersebut beberapa strategi maupun cara seperti keterbukaan dan kemudahan dalam pengelolaan kerja sama dengan aktor lain menjadi variabel dalam pendekatan ini, sekaligus menjadi variable yang penulis temukan dalam kasus yang diteliti.

Maka melalui penjelasan yang akan penulis berikan pada bab 3 ini, akan dijelaskan mengenai kontribusi UNWTO sebagai organisasi internasional melalui penggunaan variabel dari pendekatan *Managerial* (Joachim, 2008) yang memiliki karakteristik terbuka atau transparan, bekerja sama dengan berbagai aktor, serta memberikan bantuan maupun dukungan pada negara.

### **3.1. Implementasi UNWTO Dalam Mendukung Sektor Pariwisata Indonesia**

Dalam proses berjalanya implementasi yang dilakukan oleh UNWTO kepada Indonesia, mari kita awali analisis mendalam pada penelitian ini melalui kontribusi yang diberikan UNWTO terhadap pengembangan sektor pariwisata di Indonesia pasca masa panjang pandemi Covid-19. Bagian pertama yaitu peran aktif yang diberikan oleh United Nations World Tourism Organization dalam mendorong inovasi, pendidikan, dan *Rural Development* dalam membangun kembali sektor pariwisata (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023).

Kontribusi pertama berupa dukungan peran aktif yang diberikan oleh UNWTO dalam mendorong inovasi, pendidikan, dan *Rural Development* dalam

membangun kembali sektor pariwisata Indonesia menyangkut berbagai kerja sama yang dilakukan dengan berbagai aktor (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023).

Hal tersebut terbukti dengan adanya kerja sama yang terbentuk antara UNWTO dengan pemerintah Indonesia, dimana UNWTO menjadi pengawas dalam melaksanakan berbagai program yang telah diadopsi oleh pemerintah Indonesia dalam proses pengembangan sektor pariwisata.

Selain hubungan antara pemerintah Indonesia dengan UNWTO yang diwakili oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam melakukan komunikasi, kerja sama lain dalam implementasi pengembangan sektor pariwisata dalam negeri dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sebagai *Focal Point* Indonesia untuk UNWTO (Kemenlu, 2022).

Melalui Kemenparekraf selaku *Focal Point*, Kemenparekraf aktif mengaplikasikan berbagai dukungan yang telah diberikan oleh UNWTO dalam mendorong inovasi, pendidikan, dan *Rural Development* di Indonesia. Implementasi ini tak luput dengan terjalinnya kerja sama antar aktor dalam negeri seperti para masyarakat yang terlibat dalam kegiatan kepariwisataan, para pelaku industri pariwisata, dinas pariwisata, maupun para pemerintah daerah yang memiliki wewenang dalam pengembangan sektor sosial, budaya dan ekonomi.

Hal ini terbukti dengan adanya implementasi program yang berasal dari UNWTO dalam proses pengembangan sektor pariwisata melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Kemenparekraf, kegiatan tersebut berupa pemberian bantuan terhadap para pelaku UMKM (I Gusti Ayu Dewi Hendriyani, Siaran Pers

: Menparekraf Serahkan Bantuan Pemerintah pada UMKM Akademi Melayu Dermawan Batam, 2023).

Program ini memiliki tujuan dalam upaya membuka lapangan kerja seluas-seluasnya dan membangkitkan ekonomi. Selain hal tersebut upaya dalam pemberian inovasi terbukti dengan contoh seperti pemilihan wilayah pariwisata Labuan Bajo, Indonesia sebagai destinasi super prioritas dan super premium di Indonesia.

Melihat melalui sisi potensi yang dimiliki oleh kawasan Labuan Bajo, Kemenparekraf menetapkan kawasan Labuan Bajo sebagai kawasan pariwisata Floratama, dimana penetapan ini menjadi langkah dalam upaya pengembangan serta pemasaran produk ekonomi kreatif lokal ke pasar yang luas. Langkah ini dilakukan melalui cara peningkatan kualitas produk ekonomi kreatif di Floratama, yang bertujuan untuk dapat menembus pasar nasional maupun internasional.

Inovasi kawasan pariwisata tidak hanya sebatas menawarkan keindahan alam, namun juga menunjukkan potensi wisata budaya, kuliner, serta wisata Rohani yang menarik untuk dikembangkan (Kemenparekraf, 2022). Berlanjut kepada pembahasan selanjutnya terkait upaya mendorong peningkatan pendidikan terhadap pengembangan sektor pariwisata di Indonesia.

Hal ini dibuktikan melalui pemberian pelatihan dan pendampingan kepada para pelaku pariwisata khususnya yang berada di desa wisata, langkah ini dilakukan dalam tujuan untuk dapat menciptakan pelayanan maksimal kepada wisatawan. Salah satu bukti ialah dalam upaya pemberian pelatihan dan pendampingan yang ditujukan untuk Desa Wisata Sade, Lombok Tengah (I Gusti Ayu Dewi Hendriyani,

Siaran Pers : Kemenparekraf Perkuat Pelatihan dan Pendampingan Pelaku Parekraf di Desa Wisata, 2022).

Dengan potensi keindahan beserta kekuatan budaya dan ekonomi kreatif. Para masyarakat Desa Wisata Sade memiliki keterbatasan dalam pendidikan bahasa, sebagai sarana dalam berkomunikasi tentunya bahasa sangatlah penting. Dalam tujuan untuk dapat mengedepankan pelayanan terbaik bagi para wisatawan nasional maupun internasional.

Kemenparekraf melibatkan peran kerja sama dengan Poltekpar Lombok terhadap pendampingan dan pelatihan bahasa Inggris, disamping pendidikan bahasa juga diberikan pendampingan terhadap produk ekonomi kreatif agar memiliki standarisasi kualitas dan juga harga dengan batasan-batasan harga produk ekonomi kreatif yang layak dan pantas untuk daerah Lombok Tengah, ujar Sandiaga Uno selaku Menteri Parekraf (I Gusti Ayu Dewi Hendriyani, 2022).

Berlanjut implementasi peran UNWTO dalam upaya mendorong *Rural Development* dibuktikan melalui implementasi yang dilakukan oleh Kemenparekraf melalui pengembangan kualitas pariwisata dengan program pembangunan Sarhunta di Lombok Tengah (Kemenparekraf/Baparekraf RI, 2022). Sarhunta adalah Sarana Hunian Pariwisata yang merupakan sebuah program bantuan program “bedah rumah” penduduk guna meningkatkan hunian masyarakat agar layak huni, dan sekaligus dapat menjadi tempat usaha *homestay* di Kawasan Pariwisata.

Selain bantuan dalam rangka pengembangan kualitas hunian masyarakat, program Sarhunta di Lombok Tengah juga dilengkapi dengan berbagai sarana akomodasi yang memadai, hal tersebut bertujuan agar para wisatawan yang

menginap dapat merasa lebih nyaman, berbagai fasilitas tersebut seperti tempat tidur yang nyaman, pendingin ruangan, serta kamar mandi yang bersih (Kemenparekraf/Baparekraf RI, 2022).

Nilai tambahan yang menjadi daya tarik selain berbagai fasilitas yang nyaman dan dekat dengan destinasi wisata, harga sewa yang ditetapkan Sarhunta juga terjangkau. Selain hal itu Sarhunta maupun *homestay* yang dibangun di Lombok Tengah sudah mendapatkan sertifikat CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability*) serta memenuhi standar protokol Kesehatan Covid-19 (Kemenparekraf/Baparekraf RI, 2022).

Berlanjut pada bagian kedua mengenai kontribusi UNWTO dalam rangka mendukung sektor pariwisata Indonesia pada tahun 2021-2022, yaitu peran aktif menjadi tokoh penting bagi Indonesia dalam peningkatan kerja sama global yang positif dalam bidang sektor pariwisata, dengan mewakili negara kepulauan dan Asia Tenggara sebagai satu kawasan (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023).

Sebagai sebuah organisasi internasional, tentunya UNWTO menjadi wadah sekaligus menjadi fasilitator bagi para negara anggota yang salah satunya ialah Indonesia dapat bertukar pengetahuan, informasi, solusi, inovasi maupun membentuk kerja sama dalam upaya mengembangkan kapasitas negara (United Nations World Tourism Organization, 2023).

Melalui UNWTO sebagai organisasi yang khusus menaungi para negara anggota yang berfokus pada pengembangan sektor pariwisata sebagai komponen dalam peningkatan kapasitas negara, Indonesia mendapatkan berbagai keuntungan kerja sama global yang terjalin melalui UNWTO.

Salah satu contohnya ialah dengan terjalinnya kerja sama antara Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dengan Kementerian Kebudayaan dan Pemuda Persatuan Emirat Arab mengenai kerja sama dalam bidang ekonomi kreatif (Kemenparekraf RI K. P., 2021).

Hal ini dibuktikan melalui transparansi laporan Kemenparekraf berupa *Memorandum of Understanding* (MoU) atau bisa disebut sebagai Memorandum Saling Pengertian pada 5 Maret 2021, dimana isi dalam MoU tersebut tertulis tujuan kesepakatan bersama yang tertuang dalam pasal 1 yaitu :

- A. Mendorong kerja sama antara masyarakat kedua negara dalam bidang ekonomi kreatif;
- B. Mendorong dan meningkatkan pengembangan sumber daya manusia untuk ekonomi kreatif; dan
- C. Memfasilitasi saling pengertian dan dukungan antara masyarakat di kedua negara di bidang ekonomi kreatif.

Selain tujuan kesepakatan bersama, terdapat juga detail bidang kerja sama yang disepakati dan tertuang dalam pasal 2 yaitu :

- A. Arsitektur;
- B. Fesyen;
- C. Desain;
- D. Seni rupa;
- E. Publikasi; dan
- F. Bidang kerja sama lain yang akan diputuskan bersama oleh para pihak.



Berlanjut membahas terkait kerja sama yang telah disusun, terdapat bentuk-bentuk kerja sama yang dapat dilakukan sebagai berikut :

- A. Pertukaran informasi, program, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kapasitas di bidang kerja sama sebagaimana dimaksud pada pasal 1;
- B. Berbagi informasi tentang riset pasar dan tren kebijakan;
- C. Berbagi pengalaman mengenai pengembangan model-model pembiayaan ekonomi kreatif, termasuk sumber pembiayaan dan investasi;
- D. Menyelenggarakan penampilan-penampilan dan berpartisipasi dalam pameran-pameran dagang dan ekshibisi untuk mempromosikan kemitraan usaha;
- E. Memfasilitasi program produksi bersama dan merek bersama serta saling mendukung produksi dan pemasaran produk dan layanan kreatif;
- F. Membangun hubungan kuat antara ekonomi kreatif di kedua negara; dan
- G. Bentuk kerja sama lain yang disepakati secara tertulis oleh para pihak.

Beberapa penyampaian yang telah penulis sampaikan diatas merupakan sebuah bukti bahwa adanya kerja sama global yang terjalin terutama dalam upaya pengembangan sektor pariwisata maupun ekonomi kreatif yang berasal dari adanya peran UNWTO sebagai tokoh penting dalam peningkatan kerja sama global bagi Indonesia yang tentunya positif dalam bidang sektor pariwisata (Kemenparekraf RI K. P., 2021).

Selanjutnya terdapat bukti tambahan yang memperkuat pernyataan bahwasanya UNWTO menjadi tokoh penting dalam peningkatan kerja sama global yang positif dalam sektor pariwisata ialah dengan adanya *Memorandum of*

*Understanding* (MoU) antara Pemerintah Kerajaan Kamboja dengan Pemerintah Republik Indonesia tentang kerja sama pariwisata.

MoU terbaru yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada 18 Januari 2022, merupakan pembaharuan Memorandum Saling Pengertian tentang kerja sama pariwisata yang disepakati pada tahun 1999. Isi pembaharuan MoU yang telah disepakati tersebut yang pertama ialah terkait tujuan kerja sama yang tertuang dalam pasal 1 yaitu :

- A. Mendorong dan mengembangkan pariwisata untuk keuntungan bersama para pihak;
- B. Mendorong arus wisatawan antara kedua negara;
- C. Meningkatkan kerja sama industri pariwisata kedua negara; dan
- D. Meningkatkan pengembangan sumber daya manusia di industri pariwisata dan perjalanan di kedua negara.

Selain tertuliskan tujuan kerja sama yang tertuang dalam pasal 1, terdapat kesepakatan tertulis mengenai penunjukan yang dilakukan oleh para pihak yang tertuang dalam pasal 2 sebagai lembaga pelaksana untuk tujuan koordinasi dan komunikasi yaitu :

- A. Untuk pemerintah Pemerintah Republik Indonesia adalah kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- B. Untuk pemerintah Kerajaan Kamboja adalah Kementerian Pariwisata.

Selanjutnya, terdapat bidang dan bentuk kerja sama yang telah disepakati dalam upaya mendorong pariwisata dalam program bidang-bidang sebagai berikut yang tertuang dalam pasal 3 MoU yaitu :

- A. Kerja sama promosi dan pemasaran pariwisata, promosi dan pemasaran pariwisata bersama dipameran perjalanan regional dan internasional, eksibisi dan kegiatan terkait promosi pariwisata lainnya untuk menarik arus masuk pengunjung yang lebih besar dari kedua negara, serta dari negara-negara ketiga.
- B. Pengelolaan destinasi wisata, pertukaran pengalaman dalam perencanaan dan pengelolaan destinasi wisata.
- C. Kerja sama swasta, mendorong dan memotivasi sektor swasta untuk berinvestasi di industri pariwisata, khususnya hotel, resor, dan pertukaran pelanggan.
- D. Peningkatan kapasitas, mendorong pertukaran keahlian dan praktik terbaik dalam pengorganisasian, pengelolaan, pengembangan, dan pengoperasian usaha pariwisata, serta pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata.
- E. Kerja sama pertemuan, insentif, konferensi, dan pameran (MICE) dan Event. Mempromosikan destinasi kerja sama pertemuan, insentif, konferensi, dan pameran (MICE) dan event kedua negara.
- F. Konektivitas, mendorong terciptanya konektivitas langsung antara kedua negara (Kemenparekraf RI K. P., 2022).

Kedua contoh memorandum merupakan akan adanya keuntungan yang diperoleh Indonesia atas adanya UNWTO sebagai tokoh penting dalam peningkatan kerja sama global yang positif dalam bidang sektor pariwisata, dimana hal tersebut tertuang dalam implementasi melalui kegiatan agenda pokok yang dimiliki oleh UNWTO sebagai organisasi internasional antar pemerintah.

Salah satu agenda pokok yang dimiliki oleh UNWTO dalam upaya memfasilitasi maupun menjembatani para negara anggota dapat saling bertukar informasi, inovasi, solusi, maupun membentuk kerja sama ialah melalui adanya agenda pertemuan rutin yang dilakukan oleh UNWTO dengan para negara anggota.

Dimana pada pertemuan rutin tersebut, UNWTO memberikan pengetahuan, nasihat, dan bantuan kepada seluruh negara-negara anggota seperti bantuan yang berupa penyusunan *Master Plan*, penanaman modal, studi kelayakan, dan pemberian teknologi di bidang pemasaran maupun promosi (United Nations World Tourism Organization, 2023).

Dengan demikian tentunya atas adanya kontribusi maupun peran UNWTO dalam menjadi tokoh penting dalam meningkatkan kerja sama Indonesia diranah global memberikan dampak positif maupun keuntungan yang dapat membantu mengembangkan kapasitas negara (Joachim, 2008) melalui terjalinnya kerja sama dengan negara-negara lain dalam upaya pengembangan sektor pariwisata.

Berlanjut kepada bagian ketiga mengenai kontribusi UNWTO dalam upaya mendukung pengembangan sektor pariwisata Indonesia di tahun 2021 hingga 2022, ialah melalui adanya pemilihan Desa Nglanggeran di Gunung Kidul, Yogyakarta, Indonesia sebagai UNWTO *Best Tourism Destination 2021* (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023).

Anugerah penghargaan yang diberikan UNWTO kepada Desa wisata Nglanggeran tersebut berlangsung pada saat seremoni UNWTO *Best Tourism Villages* yang dilaksanakan dalam rangkaian program “*Thematic Session*” pada sidang umum UNWTO ke-24 di Madrid, Spanyol, Kamis 2 Desember 2021 (i Gusti Ayu Dewi Hendriyani, 2021).

Desa Ngelanggeran terpilih sebagai salah satu dari 43 Desa dari 32 Negara yang meraih penghargaan tersebut, Penghargaan yang diberikan oleh UNWTO memiliki tujuan untuk dapat meningkatkan peran pariwisata dalam upaya melestarikan Desa, termasuk lanskapnya, keanekaragaman alam dan budaya, kearifan lokal, serta gastronomi desa (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023).

Selain anugerah penghargaan yang didapatkan oleh Desa Nglanggeran, pengakuan UNWTO yang dilakukan melalui pemilihan Desa wisata Ngelanggeran sebagai *Best Tourism Destination 2021* semakin menjadikan Desa Ngelanggeran sebagai destinasi pariwisata yang memiliki komitmen kuat dalam inovasi dan melakukan transformasi menuju pembangunan berkelanjutan (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023).

Desa Ngelanggeran mengadopsi konsep *Community-based Tourism*, dimana masyarakat menyediakan *Homestay* lokal sehingga para wisatawan yang datang mendapatkan pengalaman autentik berada dan dapat merasa menjadi bagian dari pedesaan.

Selain hal tersebut, Desa Ngelanggeran juga dipresiasi atas inovasi-inovasi digital seperti penggunaan sistem *E-Ticketing* yang telah dilakukan sejak tahun 2015 dan adanya situs Desa yang menginformasikan jumlah total kunjungan setiap 10 menit dalam tujuan untuk memudahkan siapa saja dapat memantau aktivitas di Desa (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023).

Melalui adanya pemilihan serta penganugerahan *Best Tourism Destination 2021* yang diberikan oleh UNWTO kepada Desa Wisata Ngelanggeran Indonesia, mendorong penuh atas upaya peningkatan kualitas dan promosi pariwisata dalam

negeri Indonesia. Hal ini tentunya menjadi bukti nyata, atas adanya peran penting maupun kontribusi yang diberikan oleh UNWTO kepada Indonesia dalam upaya meningkatkan sektor pariwisata di Indonesia, dan tentunya membantu mengembangkan kapasitas negara melalui sektor pariwisata.

Berlanjut kepada bagian ketiga mengenai kontribusi UNWTO dalam upaya mendukung pengembangan sektor pariwisata Indonesia di tahun 2021 hingga 2022, ialah melalui adanya penetapan Bali, Indonesia menjadi *Host World Tourism Day 2022* (WTD 2022) untuk pertama kalinya melalui keputusan penetapan yang berlangsung pada saat sidang majelis umum ke-24 UNWTO di Madrid, Spanyol pada tanggal 30 November – 3 Desember 2021 (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023).

*World Tourism Day* atau apabila diterjemahkan memiliki arti yaitu hari pariwisata sedunia, adalah sebuah agenda rutin yang telah ditetapkan UNWTO sebagai perayaan terhadap kontribusi pariwisata sebagai bagian penting dalam pertumbuhan ekonomi Dunia. *World Tourism Day* diadakan secara rutin dengan puncak acara yang berlangsung setiap tanggal 27 September (Nations, 2023).

*World Tourism Day* dirayakan setiap 27 September sejak tahun 1980, dipilihnya tanggal tersebut menandai diadopsinya statute UNWTO pada tahun 1970 yang mendasari pembentukan UNWTO pada tahun 1975. *World Tourism Day* dirayakan dalam tujuan untuk mendorong kemajuan pariwisata di Dunia serta mempromosikan peran pariwisata sebagai salah satu *Driver for Global Developmnet* (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023).

Pada *World Tourism Day 2022* yang diadakan pada 27 September 2022 dan berlokasi di Bali, Indonesia. Mengusung tema “*Rethinking Tourim*”, tema ini

diangkat dalam tujuan untuk membahas perkembangan sektor pariwisata selama masa pandemi dan bagaimana pembuat kebijakan dan para pelaku industri mampu beradaptasi serta memperkuat pariwisata dalam menghadapi tantangan Global (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023).

*World Tourism Day 2022* dihadiri oleh 11 Menteri/Wakil Menteri Pariwisata, 328 Peserta hadir secara Offline, 422 Peserta hadir secara Online meliputi perwakilan negara anggota Internasional, *Stakeholder* Pariwisata Nasional dan Internasional. Sebuah kebanggaan dan sejarah bagi Indonesia, selain mendapat kehormatan sebagai tuan rumah hari pariwisata dunia untuk pertama kalinya, *World Tourism Day 2022* tercatat dihadiri oleh delegasi Internasional terbanyak dalam sejarah UNWTO (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023).

Pada *World Tourism Day 2022*, Indonesia mendapat apresiasi yang tinggi oleh UNWTO karena telah berhasil mengumpulkan Pejabat Tinggi Pariwisata negara-negara G20. Sekjen UNWTO serukan semua pihak untuk berpartisipasi dalam pemulihan pariwisata karena menyentuk banyak sekali area dan mempekerjakan banyak orang, termasuk perempuan dan para generasi muda (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023).

Antusiasme pada saat berlangsungnya *World Tourism Day 2022* merupakan wujud determinasi pihak swasta dan para pelaku bisnis untuk mengembangkan sektor pariwisata dengan lebih baik. Hal ini membuktikan bahwasanya Organisasi Internasional membuktikan memiliki peran serta kapasitas yang cukup penting dalam tatanan Dunia Global.

Dimana terdapat jelas adanya sifat yang cenderung terbuka (Joachim, 2008) sebagaimana dalam proses berjalanya terjalin kerja sama yang dilakukan

dengan berbagai aktor, melakukan pengawasan, transparansi yang diberikan melalui berbagai laporan hasil kerja, dan tentunya membantu mengembangkan kapasitas negara.

Disini penulis menganalisis bahwasanya implementasi UNWTO dalam mendukung sektor pariwisata Indonesia periode 2021 – 2022 sesuai dengan konsep teori implementasi organisasi internasional oleh Jutta Joachim (Joachim, 2008). Hal ini dikarenakan UNWTO disini berhasil menjadi fasilitator bagi implementasi agar dapat dilaksanakan di tingkat sektor pariwisata dalam negeri Indonesia.

### **3.2. Kerja Sama Dengan Berbagai Aktor**

Implementasi yang dilakukan oleh United Nations World Tourism Organization (UNWTO) dalam rangka mendukung sektor pariwisata di Indonesia pada tahun 2021 hingga 2022, tidaklah terlepas dengan adanya kerja sama yang terjalin dengan berbagai aktor. Hal tersebut terbukti melalui berbagai peran yang telah diberikan UNWTO terhadap pengembangan sektor pariwisata di Indonesia sepanjang waktu pada tahun 2021 hingga 2022 (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023).

Untuk contoh yang pertama ialah pada implementasi UNWTO terhadap pengembangan sektor pariwisata Indonesia melalui dukungan aktif terhadap inovasi, pendidikan, dan *Rural Development* dalam membangun kembali sektor pariwisata.

Kerja sama yang terdapat pada bentuk dukungan tersebut yang pertama ialah melalui adanya jalinan komunikasi yang dilakukan UNWTO dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia bersama dengan Kemenparekraf sebagai *Focal*



*Point* Indonesia untuk UNWTO, kemudian bekerja sama dengan para pelaku industri pariwisata, dinas pariwisata, maupun para pemerintah daerah yang memiliki wewenang dalam pengembangan sektor sosial, budaya, dan ekonomi (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023).

Kemudian pada implementasi UNWTO yang kedua terhadap pengembangan sektor pariwisata di Indonesia periode 2021 – 2022 ialah melalui pemilihan Desa Ngelanggeran di Gunung Kidul, Yogyakarta, Indonesia sebagai UNWTO *Best Tourism Destination* 2021 (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023).

Pada proses beserta seleksi yang dilakukan UNWTO dalam memilih Desa Ngelanggeran sebagai *Best Tourism Destination* 2021, UNWTO bekerja sama dalam proses evaluasi bersama dengan Dewan Penasehat Independen, para ahli, maupun berbagai mitra sektor publik dan swasta yang terlibat dalam promosi pariwisata *Rural Developmnet* (UNWTO, United Nations World Tourism Organization, 2021).

Selanjutnya, pada *World Tourism Day* 2022 di Bali Indonesia. Pemilihan yang diberikan UNWTO kepada Indonesia sebagai *Host World Tourism Day* 2022, melibatkan kerja sama berupa kehadiran oleh 11 Menteri/Wakil Menteri Pariwisata, 328 Peserta hadir secara Offline, 422 Peserta hadir secara Online meliputi perwakilan negara anggota Internasional, Stakeholder Pariwisata Nasional dan Internasional (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023).

Disini penulis menganalisis bahwasanya terdapat bukti adanya kerja sama dengan berbagai aktor dalam proses implementasi UNWTO dalam mendukung sektor pariwisata Indonesia periode 2021 – 2022, hal ini sesuai dengan pendekatan

*managerial* dalam konsep teori implementasi organisasi internasional oleh Jutta Joachim yaitu hal ini adanya peran aktor lain seperti organisasi internasional, birokrasi, maupun agen lainnya dapat berperan dan memberikan kontribusi dalam melakukan implementasi perjanjian internasional (Joachim, 2008).

### **3.3. Melakukan Pengawasan**

Dalam melakukan proses pengawasan melalui *Regional Commissions* UNWTO, UNWTO melaksanakan pertemuan komisi regional yang berlangsung setidaknya setahun sekali (United Nations World Tourism Organization, 2023). Pada pertemuan tersebut, setiap negara anggota yang salah satunya ialah Indonesia, melalui Kemenparekraf selaku *Focal Point* Indonesia memberikan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kerja sama dengan UNWTO (United Nations World Tourism Organization, 2023).

Melalui hal ini, UNWTO dapat melakukan pengawasan secara baik terhadap perkembangan sektor pariwisata di Indonesia, terutama dalam memantau berbagai program serta pelaksanaan terkait aktivitas pariwisata di Indonesia. Dengan pengawasan yang dilakukan tersebut, menjadikan UNWTO dapat melakukan evaluasi dan perencanaan kedepannya terhadap pengembangan sektor pariwisata di Indonesia.

Selain pengawasan yang dilakukan melalui setiap pertemuan rutin yang dilaksanakan oleh UNWTO dengan para negara anggota, UNWTO juga melakukan pengawasan langsung di lapangan melalui perwakilan seperti Sekretaris Jenderal,

maupun *Regional Commissions* yang datang secara langsung kepada negara anggota yang ditanggung jawabi (United Nations World Tourism Organization, 2023).

Pengawasan lapangan tersebut ditujukan dalam upaya untuk memantau secara langsung pelaksanaan aktivitas pariwisata guna mendapatkan data lapangan untuk proses evaluasi dalam tujuan menilai standardisasi apakah sudah sesuai dengan prosedur maupun program yang diterapkan.

Selain melakukan pengawasan dalam rangka memantau proses perkembangan sektor pariwisata di Indonesia, implementasi UNWTO juga terbukti melalui adanya peran dalam penyelesaian masalah-masalah dalam hal pariwisata. Permasalahan yang ditanggung jawabi UNWTO ialah yang berkaitan dengan Hukum, Sosial, Politik, Agama, Lingkungan, dsb di negara anggota (United Nations World Tourism Organization, 2023). Hal ini sesuai dengan dasar tanggung jawab yang dimiliki oleh UNWTO terhadap para negara anggotanya.

Disini penulis menganalisis bahwasanya terdapat bukti sesuai dengan data yang sudah dituliskan sebelumnya, terdapat adanya proses pengawasan dalam proses implementasi UNWTO dalam mendukung sektor pariwisata Indonesia periode 2021 – 2022, terhadap pemantauan perilaku para pihak yang telah berada dalam sebuah perjanjian internasional. Hal ini sesuai dengan pendekatan *managerial* dalam konsep teori implementasi organisasi internasional oleh Jutta Joachim yaitu dengan pemberian laporan kemajuan rutin tentang kegiatan yang dilaksanakan sebuah negara di tingkat nasional kepada organisasi internasional selaku pengawas proses implementasi (Joachim, 2008).

### 3.4 Tranparansi

Pada proses transparansi UNWTO sebagai Organisasi Internasional, melalui Dewan Eksekutif dan Sekretariat. UNWTO berperan sebagai pusat data dan analisis tren terhadap perkembangan kepariwisataan Dunia yang dapat digunakan oleh negara anggota sebagai acuan dalam proses pengembangan sektor pariwisata.

Pada setiap pertemuan yang dilaksanakan oleh UNWTO dengan para negara anggota dalam rangka evaluasi, maupun pemberian sarana fasilitas untuk bertukar berbagai inovasi antar negara anggota, UNWTO juga memberikan berbagai laporan melalui sumber daya dan data yang di unggah pada *Website* resmi UNWTO yang dapat pula diakses oleh publik (United Nations World Tourism Organization, 2023).

Transparansi data laporan beserta data evaluasi ditujukan untuk mempermudah para negara anggota menyusun dasar perencanaan strategi terhadap pengembangan sektor pariwisata kedepannya. Hal ini dilakukan pada setiap tahunnya, melalui adanya pertemuan rutin yang dilakukan oleh UNWTO dengan para negara anggota, dan akan ada perekapan data laporan yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal UNWTO kemudian akan dipublikasikan melalui data hasil laporan tahunan pada website resmi UNWTO (United Nations World Tourism Organization, 2023).

Proses transparansi yang dilakukan oleh UNWTO memiliki tujuan untuk memberikan informasi menyeluruh terhadap proses pengembangan sektor pariwisata di Dunia, selain informasi dan data spesifik mengenai hasil evaluasi yang diberikan kepada negara-negara anggota. UNWTO juga memberikan transparansi secara transparan kepada publik dalam tujuan memberikan tren terkini maupun

perkembangan terbaru mengenai sektor pariwisata di Dunia (United Nations World Tourism Organization, 2023).

Disini penulis menganalisis bahwasanya terdapat bukti sesuai dengan data yang sudah dituliskan sebelumnya, terdapat adanya proses implementasi UNWTO dalam mendukung sektor pariwisata Indonesia periode 2021 – 2022. Hal ini sesuai dengan dengan pendekatan *managerial* dalam konsep teori implementasi organisasi internasional oleh Jutta Joachim yaitu transparansi dalam perilaku dan peningkatan kepatuhan, baik dengan menyediakan bantuan teknis dan/atau administratif atau dengan memberikan tekanan kepada anggota untuk mengatasi masalah pelaksanaan yang bermasalah atau tidak memadai (Joachim, 2008).

### **3.5 Membantu Mengembangkan Kapasitas Negara**

Sebagai Organisasi Internasional yang memiliki fokus terhadap sektor pariwisata Dunia, UNWTO hadir sebagai penggerak terhadap pertumbuhan ekonomi, Pembangunan inklusif, dan kelestarian lingkungan (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023). UNWTO memiliki tujuan pokok yaitu menjadikan sektor pariwisata sebagai kontributor terhadap pembangunan ekonomi. Melalui tujuan pokok tersebut, UNWTO memberikan perhatian atas Pembangunan negara-negara dalam bidang pariwisata (United Nations World Tourism Organization, 2023).

Dimana telah penulis sampaikan berbagai implementasi UNWTO dalam rangka mendukung sektor pariwisata di Indonesia pada tahun 2021 – 2022 yang terdapat pada poin bab 3.1, dapat dipahami bahwasanya UNWTO memberikan

berbagai intensif bantuan maupun dukungan dalam rangka mengembangkan kapasitas negara melalui sektor pariwisata dalam negeri di Indonesia.

Sebagai sebuah organisasi internasional, UNWTO bertanggung jawab untuk dapat memajukan serta mengembangkan kapasitas suatu negara melalui sektor pariwisata. Hal ini menjadi tujuan utama UNWTO, untuk dapat menjadikan sektor pariwisata sebagai komponen penting terhadap pengembangan ekonomi Dunia.

Disini penulis menganalisis bahwasanya terdapat bukti sesuai dengan data yang sudah dituliskan sebelumnya, terdapat adanya proses implementasi UNWTO dalam mendukung sektor pariwisata Indonesia periode 2021 – 2022. Hal ini sesuai dengan dengan konsep teori implementasi organisasi internasional oleh Jutta Joachim yaitu organisasi internasional merupakan salah satu aktor penting bertanggung jawab terhadap terjadinya implementasi, meskipun pemerintah tetaplah menjadi aktor yang tidak kalah penting karena memiliki peran otoritas nasional dalam menjadi fasilitator bagi implementasi agar dapat dilaksanakan di tingkat domestic (Joachim, 2008).

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Pariwisata merupakan salah satu sektor industri yang memiliki peran cukup strategis dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan maupun pengembangan ekonomi, walau dalam kurun waktu pada tahun 2021 hingga 2022 dunia global sedang bersama-sama berusaha untuk melakukan pemulihan ekonomi yang diakibatkan oleh efek pasca pandemi Covid-19.

Dipilihnya kurun waktu pada penelitian ini yaitu pada tahun 2021 hingga 2022, ialah karena penulis menemukan implementasi UNWTO dalam rangka mendukung sektor pariwisata di Indonesia pasca pandemi Covid-19.

UNWTO hadir sebagai organisasi internasional dalam bagian dari naungan PBB yang memiliki fokus untuk menangani pariwisata serta memanfaatkan pariwisata sebagai salah satu komponen penting dalam proses memajukan pariwisata di Dunia, selain hal tersebut UNWTO terus mendorong kemajuan sektor pariwisata sebagai komponen perdagangan internasional dan mejadi salah satu strategi efektif terhadap pembangunan ekonomi bagi negara-negara berkembang.

Terjalannya kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan UNWTO memberikan banyak manfaat maupun keuntungan yang diperoleh Indonesia. Hal tersebut terkbukti melalui berbagai implementasi yang telah diberikan oleh UNWTO terhadap pengembangan sektor pariwisata di Indonesia pada tahun 2021 hingga 2022.

Implementasi tersebut dibuktikan melalui berbagai peran aktif dalam mendorong inovasi, pendidikan, dan *Rural Development* pada sektor pariwisata di Indonesia. Berlanjut pada peran aktif UNWTO menjadi tokoh penting bagi Indonesia dalam peningkatan kerja sama global yang positif dalam bidang pariwisata. Berlanjut terhadap penghargaan yang diberikan UNWTO kepada Desa Ngelanggeran Di Gunung Kidul, Yogyakarta, Indonesia sebagai UNWTO *Best Tourism Destination 2021*. Penetapan Bali Indonesia menjadi *Host World Tourism Day 2022*.

Cukup banyak sekali keuntungan yang diperoleh Indonesia melalui keanggotanya dalam bagian dari UNWTO. Hal tersebut menjadi bukti nyata terdapatnya implementasi organisasi internasional (Joachim, 2008) yang diberikan oleh UNWTO dalam rangka mendukung sektor pariwisata Indonesia periode 2021 – 2022, dan tentunya memberikan keuntungan terhadap proses pengembangan sektor pariwisata Indonesia untuk menjadi semakin baik kedepannya.

#### **4.2 Rekomendasi**

Penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat memberikan analisis kelanjutan mengenai kontribusi UNWTO dalam upaya mendukung sektor pariwisata Indonesia di tahun-tahun selanjutnya, beserta analisis lebih mendalam terkait bentuk proses pengembangan sektor pariwisata di Indonesia, terutama dapat menjelaskan lebih mendalam terkait proses menjalin kerja sama dengan aktor-aktor lain.



## DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah, M. N. (2021). THE ROLE OF UNWTO AS AN INTERNATIONAL ORGANIZATION IN ADDRESSING THE IMPACT OF COVID-19 ON INDONESIAN TOURISM. *THE ROLE OF UNWTO AS AN INTERNATIONAL ORGANIZATION IN ADDRESSING THE IMPACT OF COVID-19 ON INDONESIAN TOURISM*, 1-11.
- Anggraini, D. (2015). Kerjasama United Nations World Tourism Organization (UNWTO) Dengan Indonesia Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata Di Pangandaran, Jawa Barat 2011-2013. *JOM FISIP*, 2, 1-7. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/32063-ID-kerjasama-united-nations-world-tourism-organization-unwto-dengan-indonesia-dalam.pdf>
- EL, A. K. (2021). Pengaruh The United Nations World Tourism Organization (UNWTO) Dalam Melaksanakan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Di Pangandaran Indonesia. *Pengaruh The United Nations World Tourism Organization (UNWTO) Dalam Melaksanakan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Di Pangandaran Indonesia*, 1-11.
- Elistia. (2021). Perkembangan Dan Dampak Pariwisata Di Indonesia Masa Pandemi Covid-19. *UEU-Article-19020-5\_0691*, 1.
- i Gusti Ayu Dewi Hendriyani, K. B. (2021). *Siaran Pers : Desa Wisata Nglanggeran Raih Gelar UWNTO Best Tourism Village*. Jakarta: Kemenparekraf/Baparekraf RI.
- I Gusti Ayu Dewi Hendriyani, K. B. (2022). *Siaran Pers : Kemenparekraf Perkuat Pelatihan dan Pendampingan Pelaku Parekraf di Desa Wisata*. Jakarta: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
- I Gusti Ayu Dewi Hendriyani, K. B. (2023). *Siaran Pers : Menparekraf Serahkan Bantuan Pemerintah pada UMKM Akademi Melayu Dermawan Batam*. Jakarta: Kemenparekraf, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi kreatif Republik Indonesia.
- Indonesia Travel. (2022, January). *7 Tourism Achievements & Awards for Indonesia in 2022 to Inspire Your Next Visit!* Retrieved from Wonderful Indonesia: <https://www.indonesia.travel/us/en/trip-ideas/7-tourism-achievements-awards-for-indonesia-in-2022-to-inspire-your-next-visit>
- Joachim, J. (2008). *International Organizations and Implementation*. USA and Canada: Routledge.
- Kemenlu, K. L. (2022). *Daftar Kerja Sama Multilateral World Tourism Organization (UN-WTO)*. Jakarta Pusat: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- Kemenparekraf. (2023, Juli 11). *kemenparekraf.go.id*. Retrieved from Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia: <https://www.kemenparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/mengenal-lebih-jauh-tentang-gastronomi-kuliner-indonesia>

- Kemenparekraf RI, K. P. (2021). *Daftar Perjanjian Bilateral Bidang Pariwisata*. Jakarta: Kemenparekraf/Baparekraf RI.
- Kemenparekraf RI, K. P. (2022). *Daftar Perjanjian Bilateral Bidang Pariwisata*. Jakarta: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi kreatif Republik Indonesia.
- Kemenparekraf, K. P. (2022). *Mengenal Lebih Dalam Potensi Wisata di Floratama*. Jakarta: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
- Kemenparekraf/Baparekraf RI. (2022). *Sarhunta, Bangkitkan Desa Wisata di Lombok Tengah*. Jakarta: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, K. R. (2023, January 26). Wawancara pengajuan data relevan mengenai kontribusi UNWTO terhadap pengembangan sektor pariwisata Indonesia 2021 - 2022. (Rifqi, Interviewer)
- Kementerian/Baparekraf RI. (2021, April Kamis). *Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia*. Retrieved from [Kemenparekraf.go.id](https://kemenparekraf.go.id): <https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Alasan-Menparekraf-Fokus-Kembangkan-5-Destinas-Super-Prioritas>
- Kemlu RI, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2022, December 9). *Daftar Kerja Sama Multilateral / World Tourism Organization (UN-WTO)*. Retrieved from [Kementerian Republik Indonesia](https://kemlu.go.id/portal/id/read/135/halaman_list_lainnya/world-tourism-organization-unwto): [https://kemlu.go.id/portal/id/read/135/halaman\\_list\\_lainnya/world-tourism-organization-unwto](https://kemlu.go.id/portal/id/read/135/halaman_list_lainnya/world-tourism-organization-unwto)
- Nations, U. (2023, 7 30). *World Tourism Day 27 September*. Retrieved from [un.org](https://www.un.org/en/page/world-tourism-day-background): <https://www.un.org/en/page/world-tourism-day-background>
- NM Ernawati, N. S. (2022). Impact Covid On Ubud Bali. *Impact Covid On Ubud Bali*, 1-10.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2023, Juni 29). *Inilah Keppres Penetapan Berakhirnya Status Pandemi COVID-19 di Indonesia*. Retrieved from [setkab.go.id](https://setkab.go.id): <https://setkab.go.id/inilah-keppres-penetapan-berakhirnya-status-pandemi-covid-19-di-indonesia/>
- United Nations World Tourism Organization. (2023). *Resource*. Retrieved from [unwto.org](https://www.unwto.org/resources-unwto): <https://www.unwto.org/resources-unwto>
- UNWTO. (2020, Desember 8). *World Tourism Organization A United Nations Specialized Agency*. Retrieved from [unwto.org](https://www.unwto.org/news/unwto-works-with-government-of-indonesia-to-restart-tourism-in-bali): <https://www.unwto.org/news/unwto-works-with-government-of-indonesia-to-restart-tourism-in-bali>
- UNWTO, United Nations World Tourism Organization. (2021, Desember 2). *World Tourism Organization A United Nations Specialized Agency*. Retrieved from [UNWTO.org](https://www.unwto.org/news/unwto-announces-list-of-best-tourism-villages-2021): <https://www.unwto.org/news/unwto-announces-list-of-best-tourism-villages-2021>